

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

Dalam meneliti pengaruh jumlah tenaga kerja, pengeluaran pemerintah dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, penelitian ini mendasarkan teori pada teori-teori yang relevan dengan penelitian sehingga mendukung bagi terciptanya hasil penelitian yang ilmiah. Dasar teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian adalah teori pembangunan, antara lain teori pertumbuhan klasik, teori pertumbuhan neo klasik, teori pertumbuhan baru

#### **A. Pengertian Pembangunan Ekonomi**

Walaupun kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan ekonomi selalu ditujukan untuk mempertinggi kesejahteraan dalam arti yang seluas-luasnya, kegiatan pembangunan ekonomi selalu dipandang sebagai sebagian dari usaha pembangunan yang dijalankan oleh suatu masyarakat, pembangunan ekonomi hanya meliputi usaha masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat pendapatan masyarakatnya, sedangkan keseluruhan usaha-usaha pembangunan meliputi juga usaha-usaha pembangunan sosial, politik, dan kebudayaan. Dengan adanya pembatasan diatas maka penelitian pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk masyarakatnya meningkat dalam jangka panjang.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 1985), hlm. 14

Pembangunan ekonomi menurut kebanyakan ahli ekonomi Islam memiliki ciri-ciri komprehensif, tidak terbatas pada variabel-variabel ekonomi semata, akan tetapi seperti ditegaskan oleh Khursyid meliputi aspek moral dan sosial, material dan spiritual. Disamping itu kata Khursyid pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari konsep keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan bagi setiap individu pada seluruh generasi, menghapus riba dan mewajibkan zakat. Pendapat lain menambahkan bahawa pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk membersihkan dan menyucikan akidah dan membenarkan iman. Dengan demikian, terdapat perbedaan mendasar antara konsep pertumbuhan ekonomi menurut Islam dengan kapitalisme dan sosialisme. Sistem ekonomi Islam menurut pandangan Khursyid berasaskan falsafah yang berhubungan dengan *al-tauhid*, *al-rububiyah* dan *al-istikhlaf*.<sup>2</sup> Namun menurut Al-Fasi perbedaan tersebut karena lebih disebabkan oleh sistem kapitalisme yang membolehkan riba dan sistem sosialisme yang cenderung tidak terikat dengan agama.<sup>3</sup>

## **B. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi

---

<sup>2</sup> Ahmad, Khursyid, *Al-Tanmiyah al-iqtisodiyah Fi Ithorin Islamiyin*, Rafiq Al-Misri (terj), *Majalah: Abhas al-Iqtisod al-Islami*, No. 2, *Bagian*. 2, hlm. 45-46

<sup>3</sup> Al-Fasi, al-Syaikh 'Allal Al-Islam Wa Mutatollabat Al-Tanmiyah Fi-Mujtama' Al-Yaum, (Dahran: Multaqa Al-Fikr al-Islami, 1971), hlm. 29

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh penambahan faktor-faktor produksi baik dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan bertambah barang modal dan teknologi yang digunakan juga semakin berkembang. Disamping itu, tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk seiring dengan meningkatnya pendidikan dan keterampilan mereka.<sup>4</sup>

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional, sedangkan pembangunan berdimensi lebih luas. Salahsatu sasaran pembangunan ekonomi daerah adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Laju pertumbuhan PDRB akan memperlihatkan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Penekanan pada proses, karena mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. Oleh karena itu, pemahaman indikator

---

<sup>4</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 3

pertumbuhan ekonomi biasanya akan dilihat dalam kurun waktu tertentu, misalnya tahunan. Aspek tersebut relevan untuk dianalisis sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong aktivitas perekonomian domestik dapat dinilai efektifitasnya

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah:

- Sumber daya manusia

Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan dengan membangun infrastruktur di daerah-daerah

- Faktor sumber daya alam

Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud diantaranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut

- Faktor ilmu pengetahuan dan teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang

semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian

- Faktor budaya

Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat menghambat proses pembangunan diantaranya sikap anarkis, egois, boros, KKN, dan sebagainya

- Sumber daya modal

Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.<sup>5</sup>

Pertumbuhan ekonomi menurut ekonomi Islam, bukan sekedar terkait dengan peningkatan terhadap barang dan jasa, namun juga terkait dengan aspek moralitas dan kualitas akhlak serta keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi. Ukuran keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata dilihat dari sisi pencapaian materi semata atau hasil dari kuantitas, namun juga ditinjau

---

<sup>5</sup> Ahmad Mahyudi, *Ekonomi Pembangunan dan Analisis Data Empiris*, Cetakan Pertama, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 9-11

dari sisi perbaikan kehidupan agama, sosial dan kemasyarakatan. Jika pertumbuhan ekonomi yang terjadi justru memicu terjadinya keterbelakangan, kekacauan dan jauh dari nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, maka dipastikan pertumbuhan tersebut tidak sesuai dengan ekonomi Islam.<sup>6</sup>

Ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, faktor-faktor tersebut adalah:<sup>7</sup>

1. Sumber daya yang dapat dikelola (*invisibile resources*)
2. Sumber daya manusia (*human resources*), dan wirausaha (*entrepreneurship*)
3. Teknologi (*technology*)

Ekonomi Islam melihat bahwa faktor-faktor diatas sangat penting dan diinginkan dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi

Penulis lainnya seperti Yusuf berpendapat bahawa penerapan *al- 'urf* untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi tidak sesuai dan tidak relevan dengan masyarakat Muslim. Ketidaksesuaian ini kata Abdul Mannan karena adanya persoalan-persoalan yang tidak popular yang tidak dapat dijadikan dasar bagi pembangunan ekonomi yang berlaku bagi masyarakat non muslim. Pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat muslim berdasarkan prinsip menggembirakan (*at-targib*) yang terdapat di dalam Al-Quran dan as-sunnah.<sup>8</sup>

Setiap wajah baik pertumbuhan ekonomi atau penurunan tahap aktiviti ekonomi hampir tidak memerlukan hujah. Dalam hal ini, adalah relevan untuk

---

<sup>6</sup> Beik, Irfan Syauqi, *Ekonomi Pembangunan Syari'ah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 120

<sup>7</sup> Ahmad, Khursid, *Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Islam, Dalam Etika Ekonomi Politik*, (Jakarta : Risalah Gusti, 1997), hlm. 85

<sup>8</sup> Yusuf, Ibrahim, *Istiratijiyatu wa Tiknik al-Tanmiyah al-Iqtisodiyah fi al-Islam*, (Kairo : Al-Ittihad al-Dauli li al-Bunuk al-Islamiyah, 1981), hlm. 221

menyebutkan bahawa syari'ah tidak mengabsahkan “buta“ mengejar target ekonomi oleh seorang individu. Pada prinsipnya, apa yang benar bagi seorang individu juga berlaku untuk kumpulan-kumpulan individu dan entiti kolektif mereka, termasuk negara. Walaupun kedudukan Islam tersebut pada pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan dasar di peringkat negeri, tidak ada keraguan untuk memantau kesehatan perekonomian dari masa ke masa. Inilah “pembangunan ekonomi” dari sudut pandang Islam.<sup>9</sup>

Islam melihat pembangunan ekonomi sebagai pertumbuhan kematangan manusia, dimana kemajuan materi harus menunjang kematangan spiritual. Beberapa tujuan penting harus di prioritaskan seperti pertumbuhan diiringi dengan tenaga kerja yang dapat diandalkan, akan menjadi suatu kualitas pekerjaan yang bermutu, stabilitas ekonomi, keadilan distribusi dan kepedulian terhadap alam. Ekonomi Islam merealisasikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Cita-cita luhur ekonomi Islam adalah melaksanakan misi sebagai khalifah di bumi dengan tugas memakmurkannya, bahwa seorang muslim berkeyakinan akan mempertanggungjawabkan kewajibannya dihadapan Allah SWT. Keuntungan material yang dicapai dalam setiap kegiatan ekonomi, bagi seorang muslim adalah menjadi tujuan perantara untuk meraih cita-cita insani berupa kepatuhan kepada Allah SWT

Kajian tentang pertumbuhan (*growth*) dan pembangunan (*development*) ekonomi dapat ditemukan dalam konsep Islam. Konsep ini pada dasarnya telah dirangkum baik secara eksplisit maupun implisit dalam Al-Qur'an, sunnah,

---

<sup>9</sup> Sayyid Tahir, “Islamic Perspectives on Economic Development” *The Pakistan Development Review*, 34 : 4 II, (Winter, 1995), hlm. 845-858

maupun pemikiran-pemikiran ulama Islam terdahulu, namun kemunculan kembali konsep ini, khususnya beberapa dasawarsa belakangan ini terutama berkaitan kondisi negara-negara muslim yang terbelakang yang membutuhkan formula khusus dalam strategi dan perencanaan pembangunannya. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ekonomi dalam Islam adalah pengawasan yang sebenarnya, yang mendapat kedudukan utama. Penyelewengan kegiatan ekonomi oleh sebagian pelaku ekonomi dikarenakan lemahnya pengawasan yang mengandalkan kontrol negara. Dalam lingkungan ekonomi Islam ditanamkan pengawasan hati nurani yang terbina atas keyakinan akan adanya Allah SWT dan perhitungan hari akhir. Seorang muslim akan merasa tidak mampu lepas dari pengawasan Allah SWT meskipun ia bisa lepas dari pengawasan kekuasaan manusia

Untuk menjawab suatu tantangan perekonomian global yang semakin besar dimasa akan datang, maka diperlukan upaya dan langkah strategis yang tepat dan efektif. Jika melihat kondisi yang ada pada saat ini, maka solusi jangka panjang terbaik yang harus dilakukan oleh suatu negara adalah dengan sistem sektor pendidikan berkualitas, sebagai pilar pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan *capale*. Sektor pendidikan inilah yang akan memproduksi SDM negara, yang akan membawa negara tersebut apakah ke arah yang lebih baik di masa depan atau sebaliknya memperburuk kondisi negara untuk masa akan datangnya.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Almizan, *Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang, *Jurnal Kajian Ekonomi Islam-Volume 1, Nomor 2*, Juli-Desember 2016



## **C. Teori Pertumbuhan Ekonomi**

### **1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik**

Menurut ekonomi klasik, Adam Smith, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk.<sup>11</sup> Laju pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas sektor-sektor dalam menggunakan faktor-faktor produksinya. Produktivitas dapat ditingkatkan melalui berbagai sarana pendidikan, pelatihan dan manajemen yang lebih baik. Menurut pertumbuhan ekonomi klasik, pertumbuhan ekonomi bergantung pada faktor-faktor produksi. Unsur pokok dari faktor produksi suatu negara ada tiga:<sup>12</sup>

1. Sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat dimana jumlah sumber daya alam yang tersedia mempunyai batas maksimum bagi pertumbuhan suatu perekonomian
2. Sumber daya insani (jumlah penduduk) merupakan peran pasif dalam proses pertumbuhan output, maksudnya jumlah penduduk akan menyesuaikan dengan kebutuhan akan tenaga kerja
3. Stok modal merupakan unsur produksi yang sangat menentukan tingkat outputnya

### **2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik**

Robert Solow dan Trevor Swaan (1956) secara sendiri-sendiri mengembangkan model pertumbuhan ekonomi yang sekarang sering disebut

---

<sup>11</sup> Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta : STIE YKPN, 1999), hlm. 104

<sup>12</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Ekonomi Makro*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 46

dengan nama Model Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik. Model Solow-Swan memutuskan perhatiannya pada bagaimana pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi dan output saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi. Model neo klasik Solow-Swan secara umum berbentuk fungsi produksi, yang bisa menampung berbagai kemungkinan substitusi antar kapital dan tenaga kerja. Dalam model pertumbuhan ekonomi Neo Klasik Solow (*Solow Neo Classical Growth Model*).<sup>13</sup>

Faktor terpenting untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi bukanlah penambahan modal dan penambahan tenaga kerja, tetapi faktor yang paling penting adalah kemajuan teknologi dan penambahan kemahiran dan kepakaran tenaga kerja.<sup>14</sup>

### **3. Teori Pertumbuhan Baru (*New Growth Theory*)**

Teori ini memberikan kerangka teoritis untuk menganalisis pertumbuhan yang bersifat endogen, pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari dalam sistem ekonomi. Menurut Romier (1994), teori ini menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi lebih ditentukan oleh sistem produksi, bukan berasal dari luar sistem. Kemajuan teknologi merupakan hal yang endogen, pertumbuhan merupakan bagian dari keputusan pelaku-pelaku ekonomi untuk berinvestasi dalam pengetahuan. Peran modal lebih besar dari sekedar bagian dari pendapatan apabila

---

<sup>13</sup> Boediono, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, (Yogyakarta : BPFE, 1985), hlm. 188

<sup>14</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 331

modal yang tumbuh bukan hanya modal fisik saja tapi menyangkut modal manusia.<sup>15</sup>

Akumulasi modal merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi. Definisi modal diperluas dengan memasukkan modal atau eksogen tapi teknologi merupakan bagian dari proses pertumbuhan ekonomi. Dalam teori pertumbuhan endogen, peran investasi dalam modal fisik dan modal manusia turut menentukan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Tabungan dan investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.<sup>16</sup>

#### **D. Tenaga Kerja**

Pekerja atau tenaga kerja adalah semua orang yang biasanya bekerja di perusahaan/usaha tersebut, baik berkaitan dengan produksi maupun administrasi. Tenaga kerja adalah penduduk yang berumur pada batas usia kerja, dimana batas usia kerja setiap negara berbeda-beda.<sup>17</sup> Salahsatu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan adalah pelaksana pembangunan itu sendiri yaitu para pekerja khususnya dan seluruh penduduk Indonesia pada umumnya. Indonesia sebagai negara berpendudukan terbesar ke 4 di dunia berarti Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya manusia yang besar.<sup>18</sup>

Untuk keperluan analisis ketenagakerjaan, secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua golongan yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Yang tergolong sebagai tenaga kerja adalah penduduk yang berumur

---

<sup>15</sup> Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia*, Edisi Ke-8, (Jakarta : Erlangga, 2004), hlm. 134

<sup>16</sup> Mankiw N Gregory, *Teori Makro Ekonomi*, (Jakarta : Erlangga, 2000), hlm. 33

<sup>17</sup> Dumairy, *Perkonomian Indonesia*, (Jakarta : Erlangga, 1996), hlm. 2

<sup>18</sup> Barthos, *Manajemen Produksi dan Operasi*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 15

didalam batas usia kerja. Batasan usia kerja berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk berumur 10 tahun atau lebih yang bekerja, mencari pekerjaan, dan sedang melakukan kegiatan lain, seperti sekolah maupun mengurus rumah tangga dan penerima pendapatan

Penduduk berumur 10 tahun keatas terbagi sebagai tenaga kerja. Dikatakan tenaga kerja bila mereka melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 (satu) jam secara terus menerus selama seminggu. Hanya sebagian kecil penduduk Indonesia yang memiliki tunjangan di hari tua yaitu pegawai negeri dan sebagian kecil pegawai swasta. Untuk golongan ini pun, pendapatan yang mereka terima tidak mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Oleh sebab itu mereka yang telah mencapai usaha pensiun biasanya tetap masih harus bekerja sehingga mereka tetap digolongkan sebagai tenaga kerja.<sup>19</sup>

Yang dimaksud dengan angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan penduduk yang belum bekerja, namun siap untuk bekerja atau sedang mencari pekerjaan pada tingkat upah yang berlaku. Kemudian penduduk yang bekerja adalah mereka yang melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa untuk memperoleh penghasilan, baik yang bekerja penuh maupun yang tidak bekerja penuh.<sup>20</sup> Angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang aktif secara ekonomis. Angkatan kerja terdiri dari penduduk usia kerja yang menawarkan tenaga kerjanya dan berhasil mendapatkan pekerjaan

---

<sup>19</sup> Payaman Simanjuntak, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : LPFE UI, 1985), hlm. 45

<sup>20</sup> Irawan dan Suparmoko, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta : BPFE, 2002), hlm. 4

(*employed*) dan penduduk usia kerja yang menawarkan tenaga kerjanya dan belum berhasil mendapatkan pekerjaan (*unemployed*), serta penduduk yang mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja.<sup>21</sup>

Sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa terdiri dari berbagai faktor seperti tenaga kerja, tanah dan modal termasuk mesin-mesin, peralatan, bahan mentah, tenaga listrik, kemajuan teknologi dan lain-lain. Namun diantara semua faktor tersebut, faktor sumber daya manusia memegang peranan utama dalam meningkatkan produktivitas karena alat produksi dan teknologi pada hakekatnya adalah hasil karya manusia. Oleh karena itu, disamping produktivitas tanah dan modal yang biasanya ditonjolkan dan menjadi pusat perhatian adalah produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang berhubungan dengan tenaga kerja itu sendiri, maupun yang berhubungan dengan lingkungan dan kebijakan pemerintah.<sup>22</sup> Penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat pengangguran, suku bunga, dianggap *ceteris paribus*. Sedangkan faktor internal dari perusahaan, antara lain tingkat upah, produktivitas, modal (teknologi) dan pengeluaran non upah.<sup>23</sup>

Kesempatan kerja adalah banyaknya orang yang dapat tertampung untuk bekerja pada suatu perusahaan atau suatu instansi.<sup>24</sup> Kesempatan kerja ini akan menampung semua tenaga kerja yang tersedia apabila lapangan pekerjaan yang

---

<sup>21</sup> Sri Haryani, *Hubungan Industrial di Indonesia*, (Yogyakarta : UPP AMP. YKNP, 2002), hlm. 7

<sup>22</sup> J Ravianto, *Produktivitas Peningkatan Hasil Usaha Kerja*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1989), hlm. 4

<sup>23</sup> Payaman Simanjuntak, *Pengantar Ekonomi sumber Daya Manusia*, hlm. 13

<sup>24</sup> *Disnakertrans, Ketenagakerjaan* (Jakarta : 2002), hlm. 4

tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang tersedia. Kebijakan negara dalam kesempatan kerja meliputi upaya-upaya untuk mendorong pertumbuhan dan perluasan lapangan kerja di setiap daerah serta perkembangan jumlah dan kualitas angkatan kerja yang tersedia agar dapat memanfaatkan seluruh potensi pembangunan di daerah masing-masing

Apabila seorang pengusaha meminta suatu faktor produksi, maka hal itu dilakukan bukan untuk memperoleh kepuasan langsung yang di harapkannya dari faktor produksi tersebut. Pengusaha tersebut menginginkan faktor-faktor produksi karena harapan akan hasil yang jerih payahnya, misalkan permintaan pengusaha akan tenaga kerja.<sup>25</sup>

Permintaan pengusaha atas tenaga kerja berlainan dengan permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Konsumen membeli barang karena barang itu memberikan nikmat (*utility*) kepada pembeli tersebut. Akan tetapi pengusaha mempekerjakan seseorang itu membantu memproduksi barang atau jasa untuk dijual kepada masyarakat konsumen. Dengan kata lain, tergantung dari pertambahan permintaan masyarakat terhadap barang dan produksinya. Permintaan tenaga kerja yang seperti itu disebut *derived demand*.<sup>26</sup>

Dalam proses produksi, tenaga kerja memperoleh pendapatan sebagai balas jasa dari upah yang telah dilakukannya, yaitu berwujud upah. Maka pengertian permintaan tenaga kerja dapat diartikan sebagai jumlah tenaga kerja yang diminta oleh pengusaha pada berbagai tingkat upah. Permintaan tenaga kerja merupakan

---

<sup>25</sup> J. Winardi, *Manajemen Perilaku Organisasi*, Revisi, (Jakarta : Kencana ,1998), hlm. 11

<sup>26</sup> Payaman Simanjuntak, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, hlm. 67

sebuah daftar berbagai alternatif kombinasi tenaga kerja dengan input lainnya yang tersedia yang berhubungan dengan tingkat gaji.<sup>27</sup>

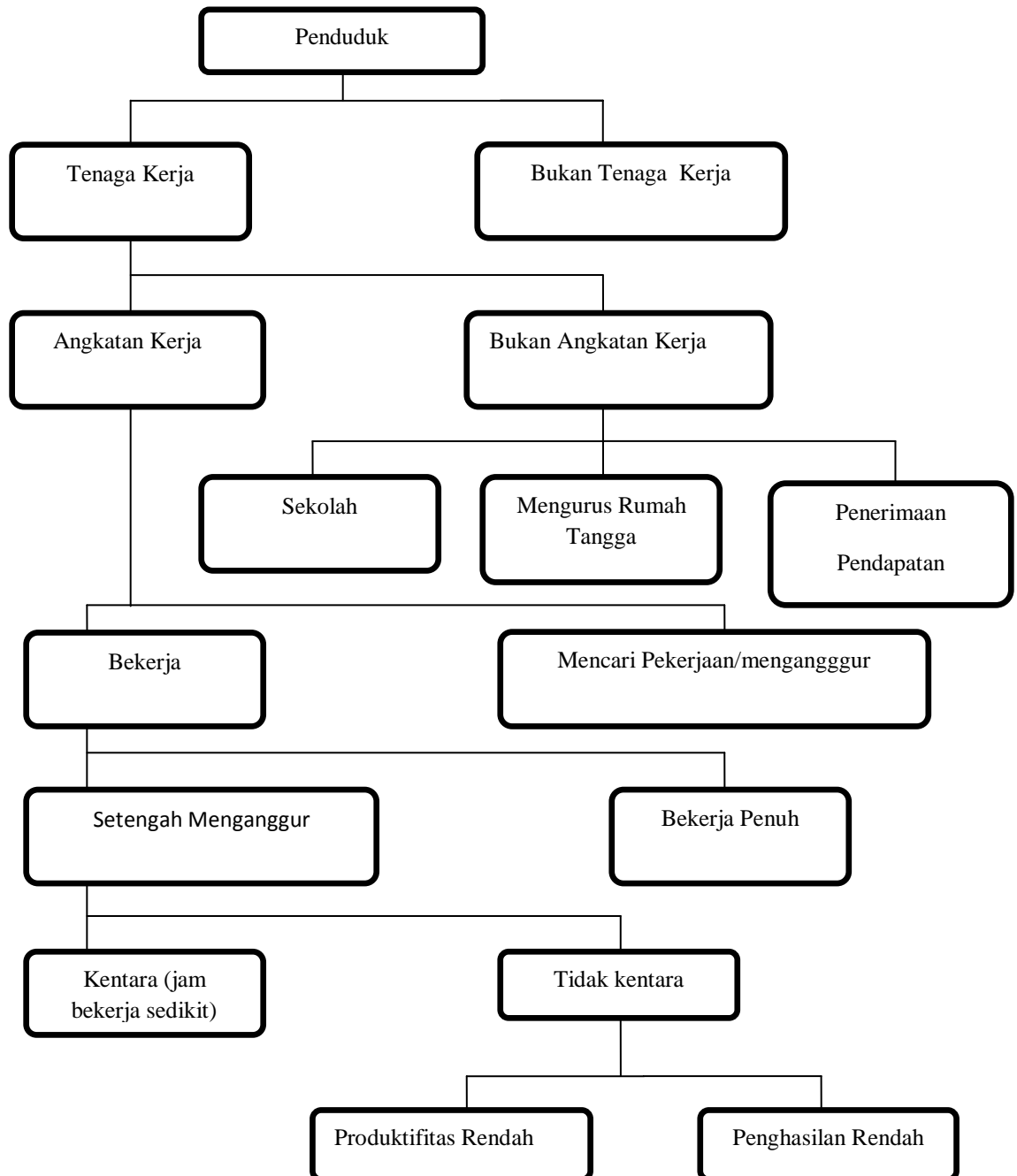
Indonesia yang memiliki wilayah yang luas dengan jumlah penduduk yang padat dan akan meningkat tiap tahunnya. Dampak yang terjadi dengan meningkatnya penduduk seharusnya berdampak positif bagi negara, semakin banyaknya jumlah penduduk berarti meningkatnya jumlah tenaga kerja yang mendorong peningkatan barang dan jasa bagi negara. Akan tetapi, berdampak negatif apabila jika peningkatan tersebut tidak diiringi dengan tersedianya jumlah lapangan pekerjaan bagi pemerintah, hal itu perlu campur tangan pemerintah untuk mengimbangi meningkatnya jumlah penduduk terhadap permintaan lapangan kerja menghindari berdampak meningkatnya angka pengangguran sehingga dengan meningkatnya tenaga kerja berharap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dalam barang dan jasa.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Aris Ananta, *Ciri Demografis, Kualitas Penduduk dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta : FEU, 1993), hlm. 39

<sup>28</sup> Payaman Simanjuntak, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, hlm. 15

**Gambar 2.1**  
**Komposisi Penduduk dan Tenaga Kerja**



*Sumber: Payaman Simanjuntak, 1985:15*



## 1. Tenaga Kerja Menurut Perspektif Islam

Menurut Imam Syaibani, kerja merupakan usaha mendapatkan uang atau harga dengan cara halal. Dalam Islam kerja sebagai unsur produksi didasari oleh konsep istikhlaf, dimana manusia bertanggung jawab untuk memakmurkan dunia dan juga bertanggung jawab untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta yang diamanatkan Allah SWT untuk menutupi kebutuhan manusia

Sedangkan tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas. Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik atau pikiran. Tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi mempunyai arti yang besar. Karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak dieksploitasi oleh manusia dan diolah buruh. Alam telah memberikan kekayaan yang tidak terhitung tetapi tanpa usaha manusia semua akan tersimpan

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal/kerja sesuai dengan firman Allah:<sup>29</sup>

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

---

<sup>29</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 207-208

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS an-Nahl (16) ayat 97)<sup>30</sup>

Al-Qur’an memberi penekanan utama terhadap pekerjaan dan menerangkan dengan jelas bahwa manusia diciptakan di bumi ini untuk bekerja keras untuk mencari penghidupan masing-masing, Allah berfirman:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah” (QS. Al-Balad ayat 4)<sup>31</sup>

Bentuk-bentuk kerja yang di syariatkan dalam Islam adalah pekerjaan yang dilakukan dengan kemampuannya sendiri dan bermanfaat, antara lain:<sup>32</sup>

- a. Menghidupkan tanah mati (tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan oleh satu orang pun)
- b. Menggali kandungan bumi
- c. Berburu
- d. Makelar (*samsarah*)
- e. Peseroan antara harta dengan tenaga (*mudarabah*)
- f. Mengairi lahan pertanian (*musyaqah*)
- g. Kontrak tenaga kerja (*ijarah*)

<sup>30</sup> Al-Qur’an dan Terjemah, Departemen Agama Republik Indonesia 2005

<sup>31</sup> Al-Qur’an dan Terjemah, Departemen Agama Republik Indonesia 2005

<sup>32</sup> An-Nabhani, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, (Jakarta : Dana Bakti, 2002), hlm. 74

## 2. Kontrak Tenaga Kerja (Ijarah) dalam Perspektif Ekonomi Islam

Ijarah adalah pemilikan jasa dari seorang ajir (orang yang dikontrak tenaganya) oleh musta'jir (orang yang mengontrak tenaga), serta pemilikan harta dari pihak musta'jir oleh seorang ajir. Atau dengan kata lain, ijarah merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi

Syarat sah dan tidaknya transaksi ijarah tersebut adalah adanya jasa yang dikontrakkan haruslah jasa yang mubah. Tidak diperbolehkan mengontrak seorang ajir untuk memberikan jasa yang diharamkan. Hal-hal yang terkait dengan kesepakatan kerja dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Ketentuan kerja, ijarah adalah manfaat jasa seseorang yang dikontrakkan untuk dimanfaatkan tenaganya. Oleh karena itu, dalam kontrak kerjanya harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Jenis pekerjaannya harus dijelskan, sehingga tidak kabur, karena transaksi ijarah yang masih kabur hukumnya adalah fasid(rusak) dan waktunya harus ditentukan, misalnya disebutkan harian, bulanan, atau tahunan. Bentuk kerja, tiap pekerjaan yang halal maka hukum mengotraknya juga halal. Di dalam ijarah tersebut harus tertulis jenis atau bentuk pekerjaan yang harus dilakukan seorang ajir
- b. Waktu kerja, dalam transaksi ijarah harus disebutkan jangka waktu pekerjaan itu yang dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian atau selesainya pekerjaan tertentu. Selain itu, harus ada juga perjanjian waktu bekerja bagi ajir

---

<sup>33</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UIN Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hlm. 358

- c. Gaji kerja, disyaratkan juga honor transaksi ijarah tersebut jelas, dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. Kompensasi transaksi ijarah boleh tunai dan boleh juga tidak dengan syarat harus jelas

#### **E. Pengeluaran Pemerintah**

Semua pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah sehubungan dengan operasionalnya dan dalam hal mana pemerintah menerima balasan jasa langsung darinya seperti membayar gaji PNS dan ABRI.<sup>34</sup> Pengeluaran konsumsi pemerintah didefinisikan sebagai jumlah seluruh pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatannya, yang terdiri dari pembelian barang dan jasa termasuk bantuan social (biaya antara), pembayaran balas jasa pegawai (belanja pegawai), dan penyusutan barang modal, dikurangi dengan hasil penjualan barang dan jasa (output pasar) pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pemerintah (yang bukan dikonsumsi pemerintah). Pengeluaran pemerintah merupakan instrumen untuk mengukur besarnya peran pemerintah maupun peran pihak swasta. Selain itu pengeluaran pemerintah dapat digunakan sebagai penentu jumlah pengeluaran agregat maupun penentu pertumbuhan GNP riil dalam jangka pendek. Pengeluaran pemerintah atas barang maupun jasa dikelompokkan ke dalam dua kelompok yaitu konsumsi pemerintah dan investasi pemerintah. Yang termasuk dalam golongan yang pertama (konsumsi pemerintah) adalah pembelian ke atas barang dan jasa yang akan dikonsumsi, seperti membayar gaji guru sekolah, membeli alat-alat tulis dan kertas untuk digunakan dan membeli bensin untuk kendaraan pemerintah. Sedangkan investasi

---

<sup>34</sup> Putong, *Ekonomi Moneter*, Cetakan Ke-10, (Yogyakarta : BPFE, 2003), hlm. 16

pemerintah meliputi pengeluaran untuk membangun prasarana seperti jalan, sekolah, rumah sakit dan irigasi.<sup>35</sup>

Fungsi pemerintah adalah alokatif, distributif, stabilitif dan dinamisatif pemerintah harus dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Pemerintah akan melakukan pengeluaran belanja pembangunan sebagai langkah untuk menjalankan fungsi-fungsinya tersebut. Belanja pembangunan merupakan pengeluaran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Tujuan dari pembangunan salahsatunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Pemenuhan kebutuhan dasar akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya yang berkualitas akan mampu memberikan kontribusi dalam kemajuan teknologi yang lebih mutakhir sehingga dapat meningkatkan efisiensi produksi.<sup>36</sup>

Modal manusia dapat mengacu pada pendidikan, namun juga dapat digunakan untuk menjelaskan jenis investasi manusia lainnya yaitu investasi yang mendorong ke arah populasi yang sehat yaitu kesehatan pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar di suatu wilayah. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk mencapai kehidupan yang layak. Pendidikan memiliki peran yang penting dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi

---

<sup>35</sup> Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan Proses Masalah dan Dasar kebijakan*, cetakan Ke-3, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 6

<sup>36</sup> Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta : Erlangga, 1996), hlm. 6

modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.<sup>37</sup>

Perbaikan kualitas modal manusia tergantung pada tersedianya infrastruktur untuk menunjang investasi pada sumber daya manusia. Perumahan dan transportasi merupakan barang publik yang dapat disediakan pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Ketersediaan perumahan yang layak akan membuat kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik karena dengan rumah yang layak dapat mendukung kesehatan dan pada akhirnya akan meningkatkan produktifitas sumber daya manusia. Jaringan transportasi yang terintegrasi dengan baik akan melancarkan distribusi kegiatan ekonomi dan secara jangka panjang dapat menjadi media pemerataan pembangunan

Ada tiga alasan utama mengapa infrastruktur penting dalam sebuah integrasi ekonomi. Alasan pertama adalah ketersediaan infrastruktur yang baru merupakan mesin utama pembangunan ekonomi. Kedua, untuk memperoleh manfaat yang penuh dari integrasi, ketersediaan jaringan infrastruktur sangat penting dalam memperlancar aktifitas perdagangan dan investasi. Alasan ketiga adalah perhatian terhadap perbaikan infrastruktur juga penting untuk mengatasi kesenjangan pembangunan ekonomi antar negara. Infrastruktur terdiri dari beberapa subsektor, infrastruktur dalam bentuk perumahan dan transportasi merupakan cukup penting untuk menunjang kehidupan masyarakat

Pengeluaran pemerintah atas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur pada dasarnya merupakan suatu investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Efek

---

<sup>37</sup> Todaro, *Pembangunan Ekonomi*, Edisi Ke-9, (Jakarta : Erlangga, 2006), hlm. 68

pembangunan pada ketiga sektor tersebut tidak dapat berdampak langsung melainkan membutuhkan beberapa periode untuk dapat merasakan dampaknya. Terdapat *time lag* ketika pemerintah mengeluarkan anggaran pembangunan atau belanja negara untuk ketiga sektor tersebut dengan dampak kebijakan tersebut, maka dibutuhkan suatu penelitian yang menggunakan runtut waktu (*time series*) cukup panjang. Penelitian dengan menggunakan runtun waktu akan membantu melihat pengaruh pengeluaran pemerintah pada ketiga sektor tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi pemerintah dalam pendidikan, kesehatan dan infrastruktur akan menyebabkan peningkatan kualitas modal manusia dan prasarana fisik, hal ini juga akan memacu investasi ekonomi. Investasi ekonomi selanjutnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, karena banyaknya modal yang tersedia untuk pembangunan.<sup>38</sup>

Efisiensi dan efektifitas merupakan landasan pokok dalam kebijakan pengeluaran pemerintah. Sebagai suatu panduan pokok bagi pengeluaran publik, teori pengeluaran Islam memakai kaidah-kaidah yang diambil dari *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah* guna menghindari potensi-potensi inefisiensi pengeluaran, dan juga norma-norma konsumsi Islam, serta dijadikan kaidah rasionalitas bagi pengeluaran negara. Menurut Asy-Syatibi sebagaimana dikutip oleh Umar Chapra enam kaidah tersebut adalah.<sup>39</sup>

- a. Kriteria pokok bagi semua alokasi pengeluaran harus digunakan untuk kemashalatan rakyat

---

<sup>38</sup> Deni Friawan, *Kondisi Pembangunan Infrastruktur di Indonesia CSIS*, (Jakarta : Lembaga Penerbit FEUI, 2008), hlm. 14

<sup>39</sup> Umar Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi; Sebuah Tinjauan Islam, Alih Bahasa: Ikhwan Abidin Basri*, (Jakarta : Gema Insani Press Takzia Institute, 2000), hlm. 285

- b. Penghapusan kesulitan dan kerugian harus didahulukan dari pada penyediaan kenyamanan
- c. Kemaslahatan mayoritas yang lebih besar harus didahulukan dari pada kemaslahatan minoritas yang lebih sedikit
- d. Suatu pengorbanan atau kerugian privat dapat ditimpakan untuk menyelamatkan pengorbanan atau kerugian publik, dan suatu pengorbanan atau kerugian yang lebih besar dapat dihindarkan dengan memaksakan pengorbanan atau kerugian yang lebih kecil
- e. Siapapun yang menerima manfaat harus bersedia menanggung biaya
- f. Sesuatu hal yang wajib ditegakan dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun, maka menegakan faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya

Kaidah-kaidah diatas dapat membantu dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pembelanjaan pemerintah dalam Islam, sehingga tujuan-tujuan dari pembelanjaan pemerintah dapat tercapai. Diantara tujuan pembelanjaan dalam pemerintah Islam

- a. Pengeluaran demi memenuhi hajat masyarakat
- b. Pengeluaran sebagai alat redistribusi kekayaan
- c. Pengeluaran yang mengarah pada semakin bertambahnya permintaan efektif
- d. Pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dan produksi
- e. Pengeluaran yang bertujuan menekan tingkat inflasi dengan kebijakan intervensi pasar



Sebagaimana halnya penerimaan, pengeluaran negara juga memiliki beberapa prinsip yang harus ditaati oleh ulil amri yakni sebagai berikut:

- a. Tujuan pengeluaran negara telah ditetapkan oleh Allah swt
- b. Apa bila ada kewajiban tambahan , maka ia harus digunakan untuk tujuan semula kenapa harus dipungut
- c. Ada pemisahan antara pengeluaran yang wajib diadakan hanya disaat adanya harta atau disaat tidak adanya harta
- d. Pengeluaran negara harus hemat

Kebijakan belanja umum pemerintah dalam sistem ekonomi Islam dapat dibagi menjadi tiga bagian:<sup>40</sup>

- a. Belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin
- b. Belanja umum yang dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia
- c. Belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat berikut sistem pendanaanya

Kebijakan fiskal dan anggaran belanja dalam Islam memiliki prinsip bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Dari semua kitab agama masa dahulu, Al-Qur`an-lah satu-satunya kitab yang meletakkan perintah yang tepat tentang kebijakan negara mengenai pengeluaran pendapatan. Kegiatan-kegiatan yang

---

<sup>40</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana, 2007), hlm. 224

menambah pengeluaran dan yang menarik penghasilan negara harus digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial tertentu dalam kerangka umum hukum Islam seperti ditetapkan dalam Al-Qur`an dan Sunnah

Negara Islam bukan suatu teokrasi dalam arti kependetaan, tapi adalah suatu negara ideologi yang berperan sebagai mekanisme untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Qur`an dan Sunnah. Karena itu, kebijakan fiskal dalam suatu negara Islam harus sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum dan nilai-nilai Islam tersebut. Kegiatan yang menambah pengeluaran negara mempunyai dampak tertentu yang pada kehidupan sosio-ekonomi masyarakat. Berbeda dengan kitab-kitab agama lain, kitab suci Al-Qur`an telah menetapkan perintah-perintah yang sangat tepat mengenai kebijakan negara tentang pengeluaran pendapatan negara. Al-Qur`an telah menetapkan suatu kebijakan pengeluaran yang luas untuk distribusi kekayaan berimbang diantara berbagai lapisan masyarakat. Ini bukanlah berarti mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak menentu. Islam bukan hanya mencegah tapi mengutuk pemborosan. Penimbunan juga dikutuk karena dengan demikian kekayaan tak dapat beredar dan mafaat penggunaannya tidak dapat dinikmati si pemakai ataupun masyarakat. Sesungguhnya, seluruh filsafat ekonomi tentang kegiatan tambahan pengeluaran negara adalah membawa surplus kekayaan ke dalam peredaran, dan untuk menjamin distribusi kekayaan berimbang di kalangan semua masyarakat. Hal ini terutama di kalangan fakir miskin, sesuai dengan hak-hak alami serta harta benda pribadi. Tentu saja, sistem

perpajakan dalam negara Islam harus dikendalikan oleh prinsip kebajikan dan pemeliharaan untuk si miskin.<sup>41</sup>

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ  
 وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ  
 يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (Q.S. al-Baqarah 219).<sup>42</sup>

Pengeluaran pemerintah atau bisa juga yang disebut dengan kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran negara

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal

---

<sup>41</sup> Mannan dan Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1997), hlm. 230-232

<sup>42</sup> Al-Qur'an dan Terjemah, Departemen Agama Republik Indonesia 2005

berbeda dengan kebijakan moneter, yang bertujuan menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak

Kebijakan fiskal yang sering disebut “politik fiskal” atau “*fiscal policy*” biasa diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Anggaran belanja negara terdiri dari penerimaan berupa hasil pungutan pajak dan pengeluaran yang dapat berupa “*government expenditure*” dan “*government transfer*”, maka sering pula dikatakan bahwa kebijakan fiskal meliputi semua tindakan pemerintah yang berupa tindakan memperbesar atau memperkecil jumlah pungutan pajak memperbesar atau memperkecil “*government expenditure*” dan atau memperbesar atau memperkecil “*government transfer*” yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian

Kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual secara seimbang. Kebijakan fiskal lebih banyak peranannya dalam ekonomi Islam dibanding dengan ekonomi konvensional. Hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. Peranan moneter relatif lebih terbatas dalam ekonomi Islam dibanding dalam ekonomi konvensional yang tidak bebas bunga
- b. Dalam ekonomi Islam, pemerintah harus memungut zakat dari setiap muslim yang memiliki kekayaan melebihi jumlah tertentu (nisab) dan

---

<sup>43</sup> Soediyono Reksoprayitno, *Pengantar Ekonomi Makro*, edisi 6, (Yogyakarta : BPFE, 2000), hlm. 97-98

digunakan untuk tujuan-tujuan sebagaimana tercantum dalam QS At-Taubah: 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ  
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ  
 اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. (QS At-Taubah:60)<sup>44</sup>*

- c. Ada perbedaan substansial antara ekonomi Islam dan non-Islam dalam peranan pengelolaan utang publik. Hal ini karena utang dalam Islam adalah bebas bunga, sebagian besar pengeluaran pemerintah dibiayai dari pajak atau berdasarkan atas bagi hasil. Dengan demikian, ukuran utang publik jauh lebih sedikit dalam ekonomi Islam dibanding ekonomi konvensional

#### **F. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)**

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) merupakan penanaman modal, dimana modal yang diinvestasikan berasal dari modal dalam negeri dan pemilik modalnya berasal dari warga Indonesia. Dalam pasal 5 Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 telah ditentukan prosedur dalam pengajuan permohonan baru dalam rangka PMDN. Pihak yang dapat

---

<sup>44</sup> Al-Qur'an dan Terjemah, Departemen Agama Republik Indonesia 2005

mengajukan permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMDN adalah; Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Vennootschap* (CV), Firma (Fa), Badan Usaha Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Perorangan

Permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMDN diajukan kepada Kepala BKPM dalam rangkap dua dengan menggunakan formulir Model 1/PMDN. Formulir Model 1/PMDN ini telah dibakukan oleh BKPM. Ini dimaksudkan untuk mempermudah calon investor domestik untuk mengajukan permohonan kepada BKPM. Hal-hal yang harus diisi oleh calon investor dalam permohonan tersebut meliputi:<sup>45</sup>

1. Keterangan pemohon, yang meliputi nama pemohon, NPWP, akta pendirian, dan perubahannya (nama notaris, nomor dan tanggal), pengesahan menteri kehakiman (nomor dan tanggal), alamat lengkap (termasuk nomor telepon, *telex* dan *faksimile*)
2. Keterangan rencana proyek, yang meliputi bidang usaha, lokasi proyek (Kabupaten/Kota/Provinsi), produk per tahun, pemasaran per tahun, luas tanah yang diperlukan, tenaga kerja (Asing, Indonesia), rencana investasi, sumber pembiayaan, modal perseroan, jadwal waktu penyelesaian proyek dan pernyataan

Dalam permohonan itu dilampirkan hal-hal diantaranya:

1. Bukti dari pemohon, yang meliputi rekaman akta pendirian, perusahaan dan perubahannya untuk PT, BUMN/BUMD, CV, Fa, atau Rekaman anggaran

---

<sup>45</sup> Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Edisi 1-2, (Jakarta : Rajawali Pres, 2008), hlm. 129-130

dasar bagi badan usaha koperasi, atau rekaman kartu tanda penduduk (KTP) untuk perorangan

2. Surat kuasa dari yang berhak apabila penanda tangan permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri
3. Rekaman nomor pokok wajib pajak (NPWP) pemohon
4. Uraian rencana kegiatan
5. Persyaratan dan atau ketentuan sektoral tertentu yang dikeluarkan oleh pemerintah

Investasi swasta atau PMDN bruto merupakan komponen dari perbelanjaan agregat yang sifatnya tidak stabil, dan menjadi salah satu sumber penting dari konjungtur dalam perekonomian. Besarnya investasi perusahaan dapat diterangkan dalam analisis hubungannya dengan tingkat suku bunga, apabila suku bunga rendah lebih banyak investasi yang akan dilakukan, dan sebaliknya kenaikan suku bunga akan menyebabkan pengurangan dalam jumlah investasi. Selanjutnya dikatakan bahwa kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan kemakmuran masyarakat

Salahsatu bentuk sinergi antara swasta dan pemerintah tercermin dari tingkat investasi yang tinggi pada suatu daerah. Dalam pembangunan regional, memegang peran penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Penanaman modal yang baik dalam bentuk penanaman modal dalam negeri yang dikenal dengan PMDN maupun penanaman modal asing yang dikenal dengan PMA,

membutuhkan adanya iklim yang sehat dan kemudahan serta kejelasan prosedur penanaman modal

Disamping investasi swasta baik yang berasal dari PMA maupun PMDN, maka investasi pemerintah dalam hal ini adalah realisasi pengeluaran pembangunan negara juga merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.<sup>46</sup>

Di dalam ekonomi, investasi pribadi dibagi menjadi dua cara yaitu investasi aktif, dimana seseorang atau lebih menempatkan modal mereka dalam suatu proyek, mengatur proyek tersebut bersama dan menikmati hasil-hasil dari tenaga kerja dan modal mereka sendiri, dan investasi pasif, dimana investor menyediakan modal dan menerima *return* (penghasilan) tetapi tidak terjun secara jauh dalam proyek itu. Sesungguhnya investor pasif mempunyai tiga opsi; pertama, menandatangani modalnya (uang) pada bank dan menerima bunga. Kedua, membeli sekuritas dan obligasi dan menerima bunga. Ketiga, membelikannya pada saham dalam sebuah perusahaan dan menerima dividen. Dalam pandangan ekonomi Islam dua opsi tadi dimasukkan dalam kategori investasi ribawi dan berarti mendapatkan *income* riba oleh karena itu dilarang sementara opsi terakhir dan investasi aktif dibolehkan dalam Islam. Pada sisi pengusaha (*entrepreneur*), dia boleh membiayai proyeknya dengan menggunakan modal sendiri, dengan menjual saham pada usahanya, atau meminjam dengan bunga. Dalam tatanan ekonomi Islam dua metode pertama dibolehkan sedangkan metode terakhir dilarang

---

<sup>46</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Ekonomi Makro*, hlm. 70



Baik konvensional dan sistem Islam mengizinkan dan mendorong investasi aktif dimana *reward* tenaga kerja dan modal dari profit yang dihasilkan. Keduanya juga membolehkan dan menganjurkan investasi pasif dalam memegang saham (*share-holder*) perusahaan, yang juga mendapat *reward* atau *return* modal dari profit yang dihasilkan dalam bentuk *dividen*. Kedua-duanya juga mendapatkan rugi yang ditanggung oleh penyedia modal (*capital-provider*). Tetapi dalam beberapa investasi yang terdapat *income* riba atau pembiayaan yang melibatkan pembayaran riba dilarang dalam sistem Islam. Ini membuat investor pasif muslim dan *entrepreneur* muslim yang tidak dapat atau tidak akan membeli saham dalam sebuah perusahaan atau tidak mempunyai modal atau tidak dapat menambahkan bagian modal tetapi membutuhkan benih-benih kapital atau tambahan dana dalam situasi yang sulit. Karena ini kategori bentuk investor dan pengusaha merupakan bagian terbesar dari komunitas *entrepreneur*, kiranya dapat mengalami kesulitan-kesulitan mereka.<sup>47</sup>

Islam menganjurkan untuk menjaga harta benda serta mencegahnya dari kehilangan.<sup>48</sup> Sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا  
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

<sup>47</sup> Ismail, *Keuangan dan Investasi Syari'ah Sebuah Analisa Ekonomi*, Cetakan Pertama, (Jakarta : SKETSA, 2010), hlm. 194-195

<sup>48</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, Edisi 2, cet III (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm. 296

*Artinya: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik" (QS An-Nisa:5)<sup>49</sup>*

## **G. Hubungan Teori Antara Variabel Independen Terhadap Dependen**

Teori hubungan antara variabel independen yaitu tenaga kerja, pengeluaran pemerintah dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) terhadap variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi:

### **1. Hubungan Antara Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan tenaga kerja secara tradisional dianggap sebagai salahsatu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Meski demikian hal tersebut masih dipertanyakan apakah benar laju pertumbuhan penduduk yang cepat dan benar-benar akan memberikan dampak positif atau negatif dari pembangunan ekonominya. Selanjutnya dikatakan bahwa pengaruh positif atau negatif dari pertumbuhan penduduk tergantung pada kemampuan sistem perekonomian daerah tersebut dalam menyerap dan secara produktif memanfaatkan pertambahan tenaga kerja tersebut.<sup>50</sup>

Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh tingkat dan jenis akumulasi modal dan tersedianya input dan faktor penunjang seperti kecakapan manajerial dan

---

<sup>49</sup> Al-Qur'an dan Terjemah, Departemen Agama Republik Indonesia 2005

<sup>50</sup> Todaro, *Ekonomi Untuk Negara Berkembang*, Jilid 2, Edisi Ketiga, (Yogyakarta : YKPN, 2000), hlm. 21

administrasi. Dalam model sederhana tentang pertumbuhan ekonomi, pada umumnya pengertian tenaga kerja diartikan sebagai angkatan kerja yang bersifat homogen. Angkatan kerja yang homogen dan tidak terampil dianggap bisa bergerak dan beralih dari sektor tradisional ke sektor modern secara lancar dan dalam jumlah terbatas. Keadaan demikian, penawaran tenaga kerja mengandung elastisitas yang tinggi. Meningkatnya permintaan atas tenaga kerja (dari sektor tradisional) bersumber pada ekspansi kegiatan sektor modern. Dengan demikian salahsatu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja.<sup>51</sup>

## **2. Hubungan Antara Pengeluaran Pemerintah Terhadap pertumbuhan Ekonomi**

Pemerintah melakukan banyak sekali pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Pengeluaran-pengeluaran itu bukan saja untuk menjalankan roda pemerintah sehari-hari, akan tetapi juga membiayai kegiatan perekonomian. Bukan berarti pemerintah turut berbisnis, melainkan dalam arti pemerintah harus menggerakkan dan merangsang kegiatan ekonomi secara umum. Pemerintah yang baik harus senantiasa berusaha menghindari dan memperbaiki kegagalan pasar demi tercapainya efisiensi. Pemerintah juga harus memperjuangkan pemerataan melalui program perpajakan dan retribusi pendapatan untuk kelompok atau golongan masyarakat tertentu. Pemerintah harus menggunakan perangkat perpajakan, pembelanjaan dan peraturan moneter untuk menggapai stabilitas dan

---

<sup>51</sup> Todaro, *Ekonomi Pembangunan di Dunia Ketiga*, (Jakarta : Erlangga, 2004), hlm. 193

pertumbuhan ekonomi, mengurangi laju inflasi dan pengangguran serta memacu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.<sup>52</sup>

Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan untuk nasional dan APBD untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi.<sup>53</sup>

Pemerintah lebih cenderung menaikkan pajak untuk membiayai anggarannya. Disisi lain masyarakat memiliki keengganan untuk membayar pajak, terlebih lagi jika pajak terus dinaikan. Mempertimbangkan teori pemungutan suara dimana masyarakat memiliki batas toleransi pembayaran pajak.<sup>54</sup>

### **3. Hubungan Antara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Investasi merupakan kunci utama untuk mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari kemampuannya meningkatkan laju pertumbuhan dan tingkat pendapatan. Semakin besar investasi suatu negara akan semakin besar pula tingkat pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi merupakan fungsi investasi.<sup>55</sup> Selain itu investasi juga memperluas kesempatan kerja, mendorong kemajuan teknologi dan spesialisasi dalam

---

<sup>52</sup> Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta : Erlangga, 1996), hlm. 7

<sup>53</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, Persada, 2004), hlm. 15

<sup>54</sup> Guritno Mangkoesobroto, *Teori Ekonomi Makro*, (Yogyakarta : PT Rineka Cipta, 1997), hlm. 78

<sup>55</sup> Haryanto, *Sistem Manajemen Basis Data: Pemodelan, Perancangan*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005), hlm. 43

produksi sehingga meminimalkan ongkos produksi serta penggalan sumber daya alam, industrialisasi dan ekspansi pasar yang di perlukan bagi kemajuan perekonomian daerah.<sup>56</sup>

Pembangunan dan kegiatan investasi merupakan dua hal yang sulit dipisahkan, pembangunan tanpa kegiatan investasi berarti mengurangi pertumbuhan ekonomi. Dalam konsepnya mengenai pertumbuhan ekonomi diperlukan investasi yang memadai. atas dasar itulah, maka selaku pengambil keputusan. Pemerintah berkepentingan untuk mengetahui seberapa besar investasi yang dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan yang diharapkan serta sejauh mana dampak investasi pada suatu sektor ataupun wilayah

Investasi merupakan suatu hal yang penting dalam pembangunan ekonomi karena investasi dibutuhkan sebagai faktor penunjang didalam meningkatkan proses produksi. Investasi merupakan langkah awal mengorbankan konsumsi untuk memperbesar konsumsi di masa yang akan datang. Selain itu, mendorong terjadinya akumulasi modal.<sup>57</sup> Ada beberapa cara untuk meningkatkan investasi, diantaranya yaitu: (1) meningkatkan tabungan dengan mengurangi konsumsi, (2) pemerintah menjual obligasi dengan bunga menarik sehingga masyarakat tertarik untuk membelinya, (3) pembatasan impor barang-barang konsumsi bila memungkinkan membatasi barang-barang kapital agar ada inovasi didalam negeri,

---

<sup>56</sup> Machmud, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Pertama, (Bandung : Mandar Maju, 2002), hlm. 36

<sup>57</sup> Samuelson dan Nordhaus, *Mikroekonomi*, (Jakarta : Salemba Empat, 1999), hlm.136

(4) mengadakan pinjaman luar negeri, (5) memperluas sektor perdagangan luar negeri dengan menaikkan “*terms of trade*” .<sup>58</sup>

Penelitian ilmiah sebelumnya telah banyak yang membahas pengaruh tenaga kerja, pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor yang diteliti pada jurnal-jurnal tersebut sangat bergantung pada kondisi studi kasus daerah atau negara yang diteliti. Penelitian yang didalam tesisnya membahas pengaruh tenaga kerja, pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang. Hasil yang didapat adalah faktor tenaga kerja, pengeluaran pemerintah dan investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan penelitian lainnya yang dilakukan oleh Neni Pancawati menjelaskan mengenai pengaruh rasio kapital tenaga kerja, tingkat pendidikan, stok capital dan pertumbuhan penduduk terhadap GDP Indonesia. Hasil yang didapatkan adalah bahwa rasio tenaga kerja, stok kapital, dan pertumbuhan penduduk berpengaruh positif terhadap pertumbuhan output.<sup>59</sup>

#### **H. Penelitian Terdahulu**

Kajian penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi perbandingan dan acuan yang memberikan gambaran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang menyangkut pertumbuhan ekonomi. Ini didasari untuk melakukan penelitian perlu ada suatu bentuk hasil penelitian terdahulu yang dijadikan referensi perbandingan dalam penelitian

---

<sup>58</sup> Mardalena, *Perilaku Organisasi*, Edisi Kedua, (Yogyakarta : Amus, 2009), hlm. 26

<sup>59</sup> Deddy Rustiono, Tesis, *Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah*, UNDIP Semarang 2008

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Variabel</b>	<b>Alat Analisis</b>	<b>Hasil</b>
1	Marganda Simamora, Sirajuzilam (2008)	Determinan Pertumbuhan Ekonomi Regional Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan ekonomi (Y)</li> <li>• Nilai tambah industri (X1)</li> <li>• Pengeluaran pemerintah (X2)</li> <li>• Kepadatan penduduk (X3)</li> </ul>	<i>Generalize</i> <i>d least square</i> (GLS) dan jenis data panel data	Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai tambah industri daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional, sedangkan kepadatan penduduk tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional disebabkan antara lain rendahnya kualitas human capital angkatan kerja yang melakukan aktifitas ekonomi
2	Didi Nuryadin, Jamzani Sodik, Dedi Iskandar (2007)	Aglomerasi dan Pertumbuhan Ekonomi Peran Karakteristik Regional Di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laju pertumbuhan PDRB (Y)</li> <li>• Aglomerasi (X1)</li> <li>• Laju angkatan kerja (X2)</li> <li>• Laju inflasi (X3)</li> <li>• Laju keterbukaan</li> </ul>	<i>Fixwd</i> <i>Effects</i> <i>model</i> dan <i>Random</i> <i>Effect</i> <i>Model</i>	Penelitian ini mencoba mengkaji desentralisasi dampak aglomerasi terhadap pertumbuhan ekonomi regional (26 Propinsi) dan hasilnya adalah:

			<p>ekonomi (X4)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Human capital (X5)</li> </ul>		<p>Laju angkatan kerja, laju keterbukaan ekonomi, laju inflasi memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan ekonomi regional, sedangkan variabel aglomerasi dan human capital tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi</p>
3	Jamzani Sodik (2007)	<p>Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan Output (Y)</li> <li>• Rasio capital tenaga kerja (X1)</li> <li>• Tingkat pendidikan(X2)</li> <li>• Perubahan stok capital (X3)</li> <li>• Pertumbuhan penduduk (X4)</li> </ul>	<i>Fix Effect Model</i>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Investasi swasta tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi</li> <li>• Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi</li> <li>• Keterbukaan ekonomi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan angkatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan</li> </ul>



4	Neni Pancawati (2000)	Pengaruh Rasio capital tenaga kerja, tingkat pendidikan, stock capital dan pertumbuhan penduduk terhadap GDP Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GDP (Y)</li> <li>• Rasio capital tenaga kerja (X1)</li> <li>• Tingkat pendidikan (X2)</li> <li>• Stock capital (X3)</li> <li>• Pertumbuhan penduduk (X4)</li> </ul>	OLS	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan output</li> <li>• Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan output</li> <li>• Perubahan stok kapital berpengaruh positif terhadap pertumbuhan output</li> </ul> <p>Pertumbuhan penduduk berpengaruh positif terhadap pertumbuhan output</p>
5	Ayu Savitri Gama (2007)	Disparitas dan Konvergensi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kabupaten/ Kota Di Provinsi Bali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PDRB perkapita (Y)</li> <li>• Alokasi investasi (X1)</li> <li>• Jumlah penduduk bekerja (X2)</li> <li>• Tingkat pendidikan (X3)</li> </ul>	Indek Wiliamson	<p>Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa disparitas PDRB perkapita antar kabupaten/kota termasuk kriteria ketimpangan tinggi, PDRB perkapita tidak mengalami konvergensi, faktor yang signifikan yang</p>

					mempengaruhi disparitas adalah jumlah penduduk yang bekerja sedangkan tingkat pendidikan dan investasi fisik tidak signifikan, sedangkan faktor yang signifikan mempengaruhi konvergensi PDRB perkapita adalah faktor PDRB perkapita awal dan investasi fisik, sedangkan yang tidak signifikan tingkat pendidikan dan penduduk yang bekerja
6	Deddy Rustiono (2008)	Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan ekonomi (Y)</li> <li>• Tenaga kerja (X1)</li> <li>• PMA (X2)</li> <li>• PMDN (X3)</li> <li>• Belanja pemerintah (X4)</li> </ul>	OLS	Hasil estimasi diketahui bahwa tenaga kerja, investasi swasta (PMA dan PMDN) dan belanja pemerintah daerah member dampak positif terhadap perkembangan PDRB Provinsi Jawa Tengah
7	Imam	Analisis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan</li> </ul>	OLS	Penelitian tersebut

	Nugroho Heru Santoso (2005)	Pertumbuhan Kota Semarang dan Kabupaten Blora Provinsi Di Jawa Tengah	ekonomi (Y) • Investasi (X1) • Angkatan kerja (X2) • Indek harapan hidup (X3)		memberikan hasil yang menyatakan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap total output (PDRB) adalah jumlah angkatan kerja dan indeks harapan hidup. Sedangkan investasi dan variabel dummy secara individu tidak mampu menjelaskan pengaruhnya
8	Yan Wang (2002)	Sumber pertumbuhan Ekonomi China 1952-1999: menggabungkan akumulasi modal manusia	• PDB (Y) • Produktivitas (X1) • Stock of Capital (X2) • Lapangan pekerjaan (X3) • SDM (X4)	OLS	Hasil dari penelitian ini mengunjunggi isu penting sumber pertumbuhan ekonomi China. Itu perdebatan mendasar adalah atas kepentingan relatif akumulasi faktor dan pertumbuhan TFP ( <i>total factory productivity</i> ) sebagai sumber pertumbuhan output. Dengan menggabungkan ukuran modal manusia dalam fungsi produksi, kami mengevaluasi kembali kontribusi relatif

					<p>faktor produksi ke pertumbuhan agregat.</p> <p>Dengan menemukan bahwa, akumulasi modal manusia di China, seperti diukur dengan tahun-tahun rata-rata sekolah pada populasi berusia 15-64 tahun, cukup cepat dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan dan kesejahteraan. Namun, tingkat pertumbuhan modal manusia menurun pada periode reformasi di tahun 1978-1999 dan kontribusi terhadap PDB pertumbuhan itu kecil dibandingkan dengan periode pre reform</p>
9	Fang Cai (2002)	Disparitas regional dan pertumbuhan ekonomi di China	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan ekonomi (Y)</li> <li>• PDB riil per kapita (X1)</li> <li>• Human capital (X2)</li> </ul>	OLS	<p>Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa pertumbuhan regional China dapat dicirikan sebagai proses konvergensi bersyarat.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenaga kerja (X3)</li> <li>• Produktivitas tenaga kerja (X4)</li> <li>• Indeks marketisasi (X5)</li> <li>• Tingkat investasi (X6)</li> <li>• Efisiensi investasi (X7)</li> <li>• Pengeluaran pemerintah (X8)</li> </ul>		<p>Dengan demikian, faktor yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan yang berbeda antar daerah menyarankan kebijakan untuk membantu tertinggal Provinsi mengejar ketinggalan dengan lebih berkembang, hal ini menunjukkan bahwa distorsi pasar tenaga kerja mempengaruhi China ekonomi regional pertumbuhan dan menyebabkan kesenjangan</p>
10	Khalifa H. Ghali (1997)	Pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Saudi Arabia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan Ekonomi (Y)</li> <li>• Pengeluaran pemerintah (X)</li> </ul>	OLS	<p>Hasil penelitian tidak menemukan bukti yang konsisten bahwa perubahan pengeluaran pemerintah memiliki berdampak pada pertumbuhan output riil per kapita. Aliran kausalitas tampaknya berjalan di lain arah dari pertumbuhan output ke belanja pemerintah. Oleh karena itu, implikasi penting dari</p>

					analisis untuk pelaksanaan kebijakan publik di Arab Saudi adalah bahwa pemerintah bisa menghadapi defisit dengan mengecilkan ukuran dan membatasi perannya dalam perekonomian
11	Gary S. Fields (2000)	Jatuhnya ketimpangan tenaga kerja di Korea. Pertumbuhan ekonomi: pola dan penyebabnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan ekonomi (Y)</li> <li>• Tenaga Kerja (X1)</li> <li>• Angkatan kerja (X2)</li> <li>• Tingkat pendidikan (X3)</li> </ul>	OLS	Hasil dari penelitian ini yaitu tenaga kerja pendapatan di Korea telah menjadi jauh lebih merata dari waktu ke waktu. Perbandingan dari gini koefisien dan kurva Lorenz mendukung dari kesimpulan ini. Gini koefisien disajikan pada data menunjukkan koefisien hampir jatuh setiap tahun. Selanjutnya, koefisien gini turun sebelas gini poin dalam tujuh belas tahun, yang cukup besar urutan yang sama
12	Constantinos Alexiou	Pengeluaran pemerintah dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan ekonomi (Y)</li> </ul>	OLS	Implikasi kebijakan langsung dari hasil tersebut

	(2009)	pertumbuhan ekonomi: bukti ekonometrik dari selatan Eropa Timur (SEE)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengeluaran pemerintah (X)</li> </ul>		<p>adalah sangat penting terutama untuk daerah tertentu, sebagaimana pembuat kebijakan ekonomi dapat menciptakan lingkungan yang sesuai kondusif untuk memelihara pengeluaran pemerintah pada pembentukan modal, pengeluaran investasi swasta dan perdagangan. Perlu ditekankan bagaimanapun, bahwa mengingat ketersediaan data yang terbatas di wilayah tertentu serta keanehan seputar ekonomi dalam transisi, penelitian lebih lanjut di masa depan ketika data negara lebih halus yang tersedia harus menarget hubungan yang mendasari</p>
13	Tao Zhang (1998)	Desentralisasi fiskal, belanja publik dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan ekonomi (Y)</li> <li>• Desentralisasi</li> </ul>	OLS	Mungkin hal ini dapat dimengerti mengingat tahap saat pembangunan

		pertumbuhan ekonomi di China	fiskal (X1) • Belanja publik (X2)		ekonomi di China, dimana pemerintah pusat terus dibatasi oleh terbatasnya sumber daya untuk investasi publik dalam prioritas nasional seperti jalan raya, kereta api, pembangkit listrik, telekomunikasi dan energi. Proyek-proyek infrastruktur utama seperti mungkin memiliki dampak yang jauh lebih signifikan terhadap pertumbuhan di Provinsi daripada mereka rekan-rekan di setiap Provinsi
14	Alessandra Colecchia (2001)	Penurunan kematian, penanaman modal manusia dan pertumbuhan ekonomi di Amerika tahun 1990: studi perbandingan	• Pertumbuhan ekonomi (Y) • ICT Investasi (X)	OLS	Hasil dari penelitian ini yaitu kekuatan pendorong baru yang potensial pertumbuhan seperti ICT, memerlukan kerangka kerja yang sesuai kondisi. Banyak resep kebijakan yang sama yang memungkinkan faktor tradisional pertumbuhan



		sembilan negara  OECD			bekerja lebih baik yang mungkin berguna untuk memperbaiki kondisi kerangka kondusif untuk ICT dan terkait teknologi.
15	E.  Borensztein  (1998)	Bagaimana  Investasi asing  langsung  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan ekonomi (Y)</li> <li>• Investasi asing (X)</li> </ul>	OLS	<p>Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa efek menguntungkan pada pertumbuhan FDI datang melalui efisiensi yang lebih tinggi bukan hanya dari akumulasi modal yang lebih tinggi, ini menunjukkan kemungkinan menguji efek dari FDI pada tingkat faktor total pertumbuhan produktivitas di negara-negara penerima. Selain itu, mengingat ketahanan pengaruh interaksi antara sumber daya manusia dan FDI, mungkin menarik untuk mengeksplorasi efek dari FDI pada tingkat bahas di atas, FDI adalah kendaraan</p>

					<p>untuk adopsi teknologi baru, dan oleh karena itu, pelatihan yang di butuhkan untuk mempersiapkan tenaga kerja untuk bekerja dengan teknologi baru menunjukkan bahwa ada juga mungkin efek dari FDI pada akumulasi modal manusia</p>
16	Niels Hermes (2003)	Investasi Langsung Asing, Pengembangan Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan ekonomi (Y)</li> <li>• Investasi langsung asing (X1)</li> <li>• Pengembangan keuangan (X2)</li> </ul>	OLS	<p>Hasil dalam penelitian ini yaitu peran pengembang keuangan system bermain dalam meningkatkan hubungan positif antara FDI dan ekonomi pertumbuhan. Penyelidikan empiris yang disajikan di koran kuat bahwa ini terjadi. Dari 67 negara di set data, 37 telah menjadi cukup berkembang keuangan system untuk membiarkan FDI kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi</p>

*Sumber: Beberapa Hasil Penelitian Terdahulu*

Pada tabel 2.1 penelitian terdahulu diatas menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi pada variabel Y sebagai variabel dependen dengan menggunakan variabel X sebagai variabel independen berbeda dan study kasus yang berbeda dalam penelitian. Hal ini menjelaskan bahwa dari masing masing variabel X terhadap pertumbuhan ekonomi memperoleh hasil yang signifikan dan adanya hubungan positif antara X dan Y sehingga menarik untuk diteliti kembali untuk dianalisis pengaruhnya dalam objek dan tahun penelitian yang berbeda